



## LAPORAN KINERJA (LKj) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Jl. Lingkar (STA. 7 + 800) Fax. (0762) 7327021 Bangkinang

E-Mail : [bpbdkampar@yahoo.co.id](mailto:bpbdkampar@yahoo.co.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dan atas petunjuk dan Izin-Nya pula penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, disusun atas dasar hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 sebagai perwujudan hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam rangka meraih Misi untuk mencapai Visi yang sudah ditetapkan.

Materi yang dimuat dalam laporan ini memiliki kekurangan, baik bentuk penyajiannya maupun kekurangan data serta penyusunan kalimatnya. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan sarannya dalam penyempurnaan untuk lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat diketahui bagi kita semua.

Bangkinang, Desember 2023

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN KAMPAR



**Drs. AGUSTAR, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720619 199201 1 001



---

## DAFTAR ISI

	i
	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kedudukan .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi .....	7
B. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan .....	8
C. Perjanjian Kinerja .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	20
C. Analisa Akuntabilitas Kinerja.....	24
BAB IV PENUTUP .....	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar secara ex officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kampar. Kewenangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar telah dilimpahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Kampar Nomor : 01/SK/BPBD/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah serta Intruksi presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada diktum pertama menyatakan "setiap pimpinan instansi pemerintah dalam mencapai kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) menjelaskan keberhasilan dan kegagalan instansi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government).



## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

### B.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Kampar

#### 1.1 Kepala :

- a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah;
- b. Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana;
- c. Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

#### 1.2 Unsur Pengarah;

- (1) Unsur Pengarah Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir (2), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun Konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### 1.3 Kepala Pelaksana

- (1) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana pembantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait di Bidang Urusan Kebakaran.

### **C. Struktur Organisasi**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
  - a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah
  - b. Kepala BPBD membawahi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana penanggulangan bencana
  - c. Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2). Sub Bagian Perencanaan
    - 3). Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :



- 1). Sub Bidang Pencegahan;
- 2). Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Kedaruratan;
  - 2). Sub Bidang Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Rehabilitasi;
  - 2). Sub Bidang Rekonstruksi.
- f. Satuan Tugas
- g. Pusdalops PB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## C.1 Daftar Susunan Kepegawaian BPBD

Tabel : 1.1 Daftar Susunan Kepegawaian BPBD

No	Pangkat/Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	1	1	2
3	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	4	2	6
4	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	5	1	6
5	Penata (III/c)	-	-	-	-	2	-	2
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	1	1	-	2
7	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	3	-	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	1	-	-	-	1
9	Pengatur (II/c)	-	-	2	-	-	-	2
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	1	-	-	-	1
11	Juru (I/c)	-	2	-	-	-	-	2
12	Tenaga Harian Lepas	-	-	38	6	43	-	87
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>115</b>

## C.3 Pejabat Struktural

Tabel.1.3 Pejabat Struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II/b	1 Orang
2.	Eselon III/a	1 Orang
3.	Eselon III/b	3 Orang
4.	Eselon IV/a	9 Orang
Jumlah		14 Orang

## C.4 Jumlah Jabatan Fungsional Umum yang ditugaskan di BPBD

Tabel : 1.4 Jumlah Jabatan Fungsional Umum yang ditugaskan di BPBD

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Fungsional Umum BPBD	14 Orang
Jumlah		14 Orang

## C.5. Daftar Barang Inventaris/Perlengkapan BPBD Kabupaten Kampar

Tabel : 1.5 Daftar Barang Inventaris/Perlengkapan BPBD Kabupaten Kampar

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Kantor Permanen	3	3	-	
2	Computer PC Lengkap	9	9	-	
3	Computer Portable (Lap Top)	12	12	-	
4	Printer Laser	11	11	-	
5	Printer Epson Dot Metrik Besar	1	1	-	
6	Printer Epson Dot Metrik Kecil	1	1	-	
7	Camera	7	7	-	
8	Handy Cam	2	2	-	
9	Infokus/Proyektor	1	1	-	
10	Wireless	1	1	-	
11	Brankas	1	1	-	
12	Lemari Arsip (Sleding)	8	8	-	
13	Filling Kabinet	10	10	-	
14	Kursi Tamu	2	2	-	
15	Meja Tamu	2	2	-	
16	Meja Staf	2	2	-	
17	Kursi Hadap	15	15	-	





18	Tenda Posko	2	2	-	
19	Tenda	7	7	-	
20	Tenda Regu	3	3	-	
21	Velbed	20	20	-	
22	Radio Rig Lengkap	1	1	-	
23	Radio HT	4	4	-	
24	SSB Lengkap	1	1	-	
25	Perahu Karet kap. 10 orang	2	2	-	
26	Perahu Karet kap. 12 orang	1	1	-	
27	Speed Boat Kap. 8 Orang	1	1	-	
28	Mesin Perahu Karet 25 PK	1	1	-	
29	Sound System	2	2	-	
30	Mobil Dapur Lapangan	1	1	-	
31	Mobil Resque Komando	2	2	-	
32	Motor Trail	2	2	-	
33	Perahu Karet Kapasitas 10 orang	1	1	-	
34	Mesin Perahu Karet kapasitas 18 PK	1	1	-	
35	Tenda Pleton	2	2	-	
36	Tenda Regu	3	3	-	
37	Tenda Keluarga	15	15	-	
38	Velbed	30	30	-	
39	H T	10	10	-	
40	R I G	1	1	-	
41	S S B	1	1	-	
42	Lampu Senter HID Searchlight	1	1	-	
43	Genset 5 KVA	1	1	-	
44	Water Treatment Portable	1	1	-	
45	Air Conditioner (AC)	23	19	-	
46	Sekat Ruangan	3	3	-	
47	Furnitur dapur	1	1	-	
48	Meja Tenis	1	1	-	
49	Meja Staf	2	2	-	
50	Mesin Potong Rumput	1	1	-	Unit
51	Unit Transceiver VHF Transportable	1	1	-	Set
52	GPS (Global Positioning System)	1	1	-	Bh
53	Radio Repeater	1	1	-	Set
54	Papan Baliho	1	1	-	
55	Mobile Double Cabin Ford	1	1	-	
56	Sepeda Motor New Supra X	1	1	-	
57	Sepeda Motor Ferza	1	1	-	
58	Sepeda Motor CRF 150	1	1	-	
59	Sepeda Motor Scoopy	1	1	-	
60	LCD TV 32 Sony	2	2	-	
61	Kulkas LG	1	1	-	
62	Vacum Cleaner	1	1	-	
63	Baju Selam	5	5	-	-
64	Television Control Operasional Lift	1	1	-	Hibah
65	Kacam Mata Air	3	3	-	
66	Masker Full Face AGA Whit Poseidon	3	3	-	
67	Clip, Selang & Octopus	10	10	-	
68	Sarung Tangan (Tusa)	3	3	-	
69	Selang Tekanan Tinggi	3	3	-	

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama, Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah

**“Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sektor swasta, untuk tangguh bencana.
2. Meningkatkan Pencegahan & Kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana.
4. Melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap dampak bencana.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten Kampar yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari Visi, rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yaitu :

#### 2. Misi :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sector swasta untuk tangguh bencana.
- b. Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana
- d. Melaksanakan program rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap dampak bencana.

Visi BPBD Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2023 - 2026 adalah

1. Misi Pertama “Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional”
2. Misi Kedua “Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup”
3. Misi Ketiga “Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional”
4. Misi Keempat “Menciptakan iklim usaha yang kondusif”
5. Misi Kelima “Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju”

Pada dasarnya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mendukung visi dan misi Kabupaten Kampar. Untuk mencapai Misi dan Misi tersebut BPBD mempunyai fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana permasalahan bencana di Kabupaten Kampar baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

## **B. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

### **I. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Visi dan Misi diatas adalah :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- b. Mendorong semangat kemandirian, kegotong royongan dan kebersamaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- c. Mewujudkan regulasi yang lengkap dalam penanggulangan bencana
- d. Mensinkronisasikan penanggulangan resiko bencana dalam program pembangunan daerah
- e. Membangun kemitraan dengan stakeholder dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana.

### **II. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terciptanya SDM dan sarana dan program penanggulangan bencana
2. Terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana:

- 2.1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
  - 2.2. Mewujudkan program dan kegiatan kebencanaan yang tepat sasaran dalam RPB yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah
  - 2.3. Menyediakan regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif
  - 2.4. Mewujudkan komunitas masyarakat peduli bencana
  - 2.5. Membina kerjasama pemerintah, tokoh masyarakat dalam menghadapi bencana
  - 2.6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengembangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
  - 2.7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
3. Terlaksana dan terintegrasinya penanganan tanggap darurat bencana dengan meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pengungsi secara optimal.
  4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dengan meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui program perencanaan.

### III. Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diimplementasikan melalui kebijakan dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kebijakan yang telah ditetapkan adalah:

1. Mengembangkan kapasitas SDM berdasarkan kompetensi
2. Mengembangkan BPBD dan kuantitas sarana prasarana berdasarkan kebutuhan
3. Mengutamakan empowerment, mendorong partisipasi masyarakat dalam PRB
4. Menjalin kerjasama yang Strategis, berkelanjutan dengan pemangku kepentingan
5. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar meliputi tahapan-tahapan berikut:

- 1) Penetapan Sasaran Strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

- 2) Penetapan Program, Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Penetapan Kegiatan, Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun berjalan.
- 4) Penetapan Target Kerja, sebagai bentuk komitmen organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan.

#### 6. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator kinerja sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Adapun indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 7**

**INDIKATOR KINERJA SASARAN BPBD KABUPATEN KAMPAR**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3
1	Terwujudnya Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana Komunikasi, ketersediaan air dan listrik menjadi sarana pendukung yang vital bagi terselenggaranya operasional kantor</li><li>2. Untuk pelayanan kebersihan kantor diperlukan dana pembelian perlengkapan kebersihan dan uang jasa.</li><li>3. Peralatan kerja memerlukan service berkala dan penggantian spare part.</li><li>4. Administrasi perkantoran memerlukan peralatan alat tulis kantor untuk operasional</li><li>5. Dibutuhkan barang-barang cetakan, serta dana penggandaan untuk memenuhi kebutuhan administrasi</li><li>6. Untuk menunjang aktifitas perkantoran membutuhkan Laptop, mesin photo copy, umbul-umbul, baliho dll</li><li>7. Untuk peningkatan akurasi pelaksanaan kegiatan</li></ol>



		<p>dibutuhkan dasar hukum dan tata cara pengembangannya. Oleh karena itu dibutuhkan buku-buku pedoman dan penunjang peraturan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Digunakan untuk pelayanan tamu, konsumsi rapat, dan kerja bakti lapangan.</li><li>9. Guna meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan, maka pejabat eselon perlu untuk menghadiri undangan, rapat-rapat ke luar daerah dan mengurus logistik ke BNPB dan BPBD Prov.</li></ol>
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jarak tempuh untuk tanggap darurat maupun pasca bencana adalah medan yang sulit dan jarak tempuh yang jauh dan berada pada beberapa lokasi yang berjauhan.</li><li>2. Melakukan pemeliharaan Gedung Pusdalops PB untuk monitoring dan pendataan kebencanaan di Kabupaten Kampar, yang stand by selama 24 jam.</li><li>3. Kendaraan dinas operasional membutuh service berkala dan penggantian spare part</li><li>4. Untuk pengambilan bantuan barang hibah dari BNPB diperlukan biaya jasa pengiriman.</li></ol>
3	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Catatan Kinerja dan Keuangan	Untuk menyusun laporan dibutuhkan upah kerja lembur, makan minum, dan ATK, serta belanja cetak
4	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Untuk meningkatkan keamanan Personil dan efektifitas pekerjaan Pegawai dan THL Pusdalops PB, maka diperlukan pakaian kerja lapangan yang standar.
5	Meningkatnya Kemampuan Pengendalian Kebakaran hutan	Maraknya kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat maka perlu diadakan sosialisasi dampak kebakaran dan upaya penanggulangnya.
6	Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Untuk mendukung pelayanan pemadaman kebakaran dibutuhkan dana insentif dan honor bulanan.
7	Terwujudnya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk membuktikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan maka dilakukan monitoring, kemudian melakukan evaluasi, dan menyusun laporan.</li><li>2. Berkurangnya jumlah titik api dan sebaran luas kebakaran hutan dan lahan</li></ol>
8	Terwujudnya Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Daerah terdampak bencana selalu mengalami kerusakan fisik, oleh sebab itu perlu menurunkan Tim Kaji Cepat (TKC) untuk melakukan pendataan dan monitoring kebutuhan pasca bencana.</li><li>2. Dalam rangka mengurangi resiko bencana, maka diperlukan rambu-rambu peringatan pada daerah-daerah yang memiliki potensi bencana.</li><li>3. Daerah terdampak pasca bencana mengalami kerusakan-kerusakan fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Maka diperlukan anggaran sesuai dengan tingkat kerusakan. Tingkat kerusakan dapat dikategorikan rekonstruksi, ataupun rehabilitasi.</li><li>4. Pada kejadian tanggap darurat dibutuhkan dana</li></ol>



		<p>operasional tanggap darurat guna mendukung kemampuan dalam kapasitas tanggap darurat, yaitu berupa dana transportasi, sewa alat, uang lelah, penyiapan shelter, dan dana perbaikan sarana vital lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Guna meningkatkan kapasitas relawan dalam tanggap darurat, dan tersebar relawan di daerah yang berpotensi bencana maka perlu dilakukan pelatihan.</li><li>6. Untuk mempersiapkan kemampuan lebih awal dalam menghadapi bencana sesungguhnya, maka diperlukan sebuah perencanaan secara bersama antar instansi terkait, relawan. Dengan memperhitungkan kemampuan sdm, dan biaya kebutuhan konsumsi, transportasi, peralatan dll.</li><li>7. Guna meyakinkan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan program maka perlu didasari hukum yang yang jelas dan relevan.</li><li>8. Untuk mendekatkan relawan ke objek tanggap darurat maka perlu dilatih relawan relawan yang berada pada daerah/kec. Bencana.</li></ol>
9	Meningkatnya Program Pencegahan/ Pengurangan Resiko bencana dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kejadian bencana merupakan suatu musibah yang tidak hanya merusak sarana fisik dan infrastruktur, tetapi juga merusak sumber perekonomian, kejiwaan, kesehatan dan ancaman kematian. Dengan demikian penanggulangan bencana harus dihadapi secara bersama dan komprehensif.</li></ol>
10	Kemampuan dan kelembagaan sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan social	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organisasi kelembagaan sosial sangat membantu dalam Mitigasi dan pada saat Tanggap Darurat.</li></ul>
11	Menurunkan ketegangan dan segala bentuk ancaman	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terdapatnya potensi bencana alam dan potensi bencana non alam di beberapa daerah di Kabupaten Kampar.</li><li>• Aparat yang memiliki skill yang tinggi, memiliki mobilitas yang tinggi dalam penanggulangan bencana</li></ul>
12	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan social	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih banyak korban yang tidak terselamatkan</li><li>• Tidak semua bantuan yang disumbangkan langsung bisa diterima oleh korban bencana</li><li>• Korban kebakaran belum terkendali secara cepat.</li></ul>

## 7. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana APBD Tahun Anggaran 2023, dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak terarah sesuai skala prioritas.



Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 yang ditetapkan adalah:

Misi Pertama :

Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Aparat Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha untuk Tanggap Bencana.

Sasaran 1 : Terciptanya SDM, Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1. Program Penunjang Usaha Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.291.000,-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.817.026.814,-
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.700.000,-
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.741.951,-
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.740.650,-
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.871.727.797,-
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	803.871.900,-
	Jumlah	7.608.100.112,-

Misi Kedua :

Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sasaran I : Terkoordinasinya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1. Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	620.833.980,-
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.102.506.615,-





	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	443.160.930,-
	4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	24.093.636,-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.190.595.161,-</b>

Misi Ketiga:

Melaksanakan Pembinaan dan Perlindungan terhadap masyarakat yang terkena Dampak Bencana

Sasaran 1: Terlaksananya dan terintegrasinya Penanggulangan Tanggap Bencana dengan Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta Penanganan Pengungsi yang Optimal.

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1. Program Penanggulangan Bencana	1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	105.605.930,-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.605.930,-</b>

Misi Keempat:

Melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terhadap dampak Bencana

Sasaran 1 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Melalui Perencanaan dan Pengawasan dan Pendataan Daerah Pasca Bencana.

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
1. Program Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	358.443.480,-
	2. Penanganan Pascabencana Kabupateb/Kota	3.756.728.165,-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.115.171.645,-</b>

Pencapaian rencana kinerja diatas didukung dengan Anggaran Belanja dan Pedapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023. Rincian Rencana Kinerja Tahun 2023 beserta indikator kinerja dengan target capaiannya pada tingkat kegiatan sasaran, dapat dilihat secara detail pada lampiran Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2023.

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara Kepala Badan dengan Bupati sebagai pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditandatangani pada Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel . 8  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan terhadap pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.493.646.020,-
	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.991.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.281.000
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.200.000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	7.170.000
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.170.000
885.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.170.000



	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.102.482.920</b>
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.101.115.120
	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.367.800
	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>17.824.000,-</b>
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	17.824.000,-
	<b>Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>821.257.000,-</b>
	Jumlah Palet Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	8.736.000,-
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.216.350,-
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.440.000,-
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Barang yang disediakan	1 Dokumen	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.419.650,-
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	0,-
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.445.000,-
	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>478.301.252,-</b>
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	478.301.252,-
	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.047.440.048,-</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	130.636.500



	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.936.325.748
	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>590.531.000,-</b>
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	590.531.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.539.200
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.757.400
	<b>Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar</b>	%	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.497.392.415</b>
	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	%	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>745.782.500</b>
	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	461.998.000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	283.784.500
	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	%	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>4.155.300.215</b>
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	212.563.200



Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun petugas Kebencanaan /Pemadam Kebakaran	1 Unit	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	138.580.250
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	7 Paket	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	3.804.156.765
<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	%	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>531.470.000</b>
<b>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</b>		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	48.406.000
Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	148.336.000
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	334.728.000
<b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	%	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>64.839.700</b>
Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana	64.839.700

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai Misi Organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan gambaran capaian setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Berdasarkan hasil analisis kinerja diatas akan dilakukan analisis lebih lanjut yaitu:

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar belum dapat mengoptimalkan penggunaan dana tahun 2023 sehingga belum terdapat efisiensi anggaran, dan masih terdapat sisa dana yang belum dapat dipergunakan sebesar lebih kurang Rp 1.192.343.162,- atau 9,32 % dari pagu Dana sebesar Rp. 12.798.695.273,-. Pada tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan didukung dengan 2 Program 11 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III .1  
Program dan Kegiatan Pendukung

Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	% Capaian
1. Program Penunjang Usaha Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.581.000,-	94,91%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.200.000,-	100 %
	3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	7.170.000,-	100 %
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.170.000,-	100%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.170.000,-	100%
	6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.815.659.014,-	93,04%
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.367.800,-	100%
	8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.700.000,-	76,86%
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	8.736.000,-	100%



<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	Kantor		
	10. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	143.264.350,-	96,18%
	11. Penyediaan Logistik Kantor	47.375.800,-	54,18%
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.944.650 -	96,18%
	13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,-	0%
	14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.421.151,-	62,21%
	15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	640.000.000,-	83,78%
	16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.128.161,-	65,93%
	7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.785.599.636,-	92,22%
	8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	545.300.900,-	85,60%
	9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.608.000,-	92,81%
	10. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.963.000,-	99,59%
	1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	358.443.480,-	77,59%
	2. Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Bencana)	262.390.500,-	92,46%
	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	207.198.200,-	97,48%
	4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	138.580.250,-	100%
	5. Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	3.756.728.165,-	98,75%
	6. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.926.000,-	61,82%
	7. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	105.605.930,-	71,19%





	8. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	307.629.000,-	91,90%
	9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24.093.636,-	37,16%
<b>Jumlah</b>		<b>12.798.695.273,-</b>	<b>92,96%</b>

Tabel III.3

## Evaluasi Pencapaian Sasaran

Sasaran I : Terkoordinasinya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		% CAPAIAN	TAHUN 2023		% CAPAIAN
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Persentase Daerah Rawan Bencana	100 %	85 %	100 %	100 %	88 %	100 %

Pencapaian sasaran terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana BPBD Kabupaten Kampar berdasarkan kegiatan tahun 2023 meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan 1 (satu) program dan 4 (empat) Sub. kegiatan dapat dilihat pada tabel III.4

Tabel III.4

## Program dan Kegiatan Pendukung

Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	% Capaian
1. Program Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	358.443.480,-	77,59 %
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	262.390.500,-	92,46%
	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	207.198.200,-	97,48 %
<b>Jumlah</b>		<b>828.032.180,-</b>	<b>89,17 %</b>

Untuk merealisasikan sasaran diatas, BPBD Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD Kampar tahun 2023 sebesar Rp. 828.032.180,- atau 89,17 dari target sebesar



Rp. 958.345.700,- pencapaian persentase Fisik pada Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah 100 % Tahun 2023.

**Tabel. III.5**

**Evaluasi Pencapaian Sasaran**

Misi Ketiga : Melaksanakan pembinaan dan Perlindungan terhadap masyarakat yang terkena Dampak Bencana.

Sasaran I: Terlaksananya dan terintegrasinya Penanggulangan Tanggap Bencana dengan meningkatnya Penyelamatan dan evaluasi Korban Bencana serta Penanganan Pengungsi yang Optimal.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		% CAPAIAN TARGET	TAHUN 2023		% CAPAIAN
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Persentase data Daerah Rawan Korban Bencana	100 %	94,59 %	85 %	100 %	95 %	95 %

Pencapaian sasaran Terlaksananya dan terintegrasinya Penanggulangan Tanggap Bencana dengan Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta Penanganan Pengungsi yang Optimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar telah melaksanakan Indikator Kerja dengan baik yaitu 100%.

Untuk merealisasikan sasaran di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 sebesar Rp. 443.160.930,- atau 83,38 % dari target anggaran sebesar Rp. 531.470.000,-.

**Tabel. III.7**

**Evaluasi Pencapaian Sasaran**

Misi Keempat : Melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terhadap dampak Bencana

Sasaran 1 : Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Melalui Perencanaan.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		% CAPAIAN	TAHUN 2023		% CAPAIAN
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	7 Paket	7 Paket	7 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket

Pencapaian sasaran Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Melalui Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar telah melaksanakan Indikator Kerja dengan baik yaitu 100%.

Untuk mewujudkan sasaran tahun 2023 dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan dapat dilihat pada tabel III.8

**Tabel. III.8**

Program dan Kegiatan Pendukung

Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	% Capaian
1. Program Penanggulangan Bencana	1. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.756.728.165,-	98,75 %
Jumlah		3.756.728.165,-	87.33 %

Untuk merealisasikan sasaran di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD Kabupaten Kampar sebesar Rp. 3.756.728.165,- atau 87,33% dari target anggaran sebesar Rp. 3.804.156.765,-.

Sedangkan Realisasi Fisik Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota terhadap dampak Bencana sampai akhir 2023 mencapai 100%.

### C. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan pemerintahan umum. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektifitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja kegiatan.

Melalui tabel III.9 dan III.10 berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2023.

Tabel III.9  
Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2023

### 3.3. Anggaran dan Realisasi

a. Rencana Anggaran dan Realisasinya sebagai berikut :

NO	JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	( % )
1.	Belanja Pegawai	4.101.795.120,-	3.816.339.014,00	93,04
2.	Belanja Barang dan Jasa	9.347.104.315,-	8.517.829.259,-	91,13
3.	Belanja Modal	542.139.000,-	464.527.000,-	85,68
4.	Belanja Gedung dan Bangunan	60.000.000,-	59.850.000,-	99,75
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.556.000	3.556.000,-	99,89
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.991.038.435,-</b>	<b>12.798.695.273,-</b>	<b>91,48</b>

Sumber data : BPBD Kabupaten Kampar

Secara keseluruhan realisasi belanja sebesar Rp. 12.798.695.273,- atau 91,48% dari rencana anggaran belanja sebesar Rp. 13.991.038.435,- Realisasi belanja tidak mencapai 100% rincian anggaran dan realisasi belanja kegiatan selama tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel III.10

Tabel. III.10  
Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.493.646.020</b>	<b>7.608.100.112</b>	<b>89,57%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.281.000	87.581.000	94,91%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.200.000	38.200.000	100 %



3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	7.170.000	7.170.000	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.170.000	7.170.000	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.170.000	7.170.000	100%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.101.115.120	3.815.659.014	93,04%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.367.800	1.367.800,00	100%
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.824.000	13.700.000	76,86
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.736.000	8.736.000	100%
10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	162.216.350	143.264.350	88,32%
11	Penyediaan Logistik Kantor	87.440.000	47.375.800	54,18%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.419.650	11.944.650	96,18%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0	0%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.445.000	342.421.151	62,21%
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478.301.252	400.740.650	83,78%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.636.500	86.128.161	65,93%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.936.325.748	1.785.599.636	92,22%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590.531.000	545.300.900	92,34%
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.539.200	63.608.000	92,81%
20	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.757.400	194.963.000	99,56%



II	Program Penanggulangan Bencana	2.137.815.895,-	2.167.087.095,-	83,25%
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	461.998.000	358.443.480	77,59%
2	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Bencana)	283.784.500	262.390.500	92,46%
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	212.563.200	207.198.200	97,48%
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	138.580.250	138.580.250	100%
5	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	3.804.156.765	3.756.728.165	98,75%
6	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	48.406.000	29.926.000	61,82%
7	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	148.336.000	105.605.930	71,19%
8	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	334.728.000	307.629.000	91,90%
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	64.839.700	24.093.636	37,16%
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.991.038.435</b>	<b>12.798.695.273</b>	<b>91,48%</b>

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 12.798.695.273,- atau 91,48% dari Pagu Dana sebesar Rp. 13.991.038.435,-

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatannya dalam mencapai sasaran dan tujuan secara periodik atau wujud akuntabilitas penerima mandat kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Dari LKj tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas maka pada bab IV yang merupakan bab penutup ini disimpulkan bahwa pencapaian kegiatan fisik terlaksana **100%**, sedangkan realisasi keuangan **91,48%**. Pada umumnya semua kegiatan telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LKj tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

Bangkinang, Desember 2023

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN KAMPAR



**Drs. AGUSTAR, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720619 199201 1 001



## DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : LAMPIRAN IKK III.2
- LAMPIRAN II : LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2023.